

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UUSPN No.20 Tahun 2003). Berdasarkan isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan adalah agar peserta didik dapat menjadi seorang manusia yang utuh sesuai dengan karakter yang mulia. Selain itu setiap individu mampu mengubah perilaku atau sikapnya menjadi lebih baik apabila seseorang tersebut telah melalui proses pendidikan. Perubahan tersebut tentu tidak terlepas dari adanya pengaruh lingkungan atau pun makhluk lain yang menyebabkan perubahan sikap atau kebiasaan.

Salah satu masalah yang terjadi ataupun bahkan kita rasakan sama-sama di lingkungan kita akhir-akhir ini ialah permasalahan degradasi moral. Degradasi moral ini menjadi tantangan dan tanggung jawab dunia pendidikan (Juliardi, 2015; Prihatmojo & Badawi, 2020; Juliani, 2021). Degradasi moral tersebut salah satunya dipicu oleh perkembangan zaman saat ini dimana globalisasi membuat batasan-batasan dunia seolah hilang, diiringi akses kemudahan teknologi yang juga riskan akan dampak negatifnya. Hal tersebut senada dengan pendapat yang disampaikan oleh Prihatmojo & Badawi (2020) bahwa kecanggihan teknologi *smartphone* menyajikan kemudahan bagi hampir seluruh kalangan dalam mengakses internet, media sosial dan game *online* dengan segala dampaknya. Masalah degradasi moral salah satunya dapat kita lihat berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2021), bahwa kasus perundungan terhadap anak-anak paling banyak dialami oleh siswa Sekolah Dasar. Selain itu, Prihatmojo & Badawi (2020) juga menegaskan bahwa degradasi moral di sekolah dasar semakin memprihatinkan dari banyaknya penyimpangan-penyimpangan perilaku oleh pelajar sekolah dasar, seperti perkelahian antar pelajar, *bullying*, narkoba, pelecehan seksual, mabuk dan merokok dilingkungan sekolah. Oleh karena masalah tersebut, maka urgensi pendidikan karakter dalam pendidikan wajib ditingkatkan.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan bahwa satuan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berkaitan dengan bunyi undang-undang tersebut maka misi pendidikan ialah bukan hanya harus membentuk peserta didik yang cerdas secara kognitif, namun juga harus menjadi warga negara yang berkarakter luhur. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Juliani & Bastian (2021) bahwa pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kapasitas belajar, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik. PPKn merupakan salah satu wahana dalam membentuk warga negara dengan karakter yang luhur. Susiatik (2013) pun menyatakan bahwa pendidikan karakter menjadi salah satu misi yang diemban PPKn, selain pendidikan politik/pendidikan demokrasi, pendidikan moral dan pendidikan hukum di setiap jenis dan jenjang pendidikan.

Menurut Kaelan (2010), untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang kuat pada hakikatnya harus didasarkan pada dasar filosofis bangsa. Bangsa Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai dasar ideologi atau dasar filosofis negara, oleh karena itu maka karakter-karakter yang sesuai dengan amanat Pancasila merupakan sebuah tujuan yang hendak dicapai oleh PPKn. Sebagaimana Juliardi (2015) mengatakan bahwa tujuan PPKn pada dasarnya adalah untuk menciptakan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendapat lain dari Setiawati & Dewi (2021) bahwa secara umum tujuan PPKn adalah untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizen*). Namun berdasarkan pengamatan peneliti, pada praktiknya meskipun upaya membelajarkan Pancasila telah dilakukan, masih saja didapati penyimpangan-penyimpangan karakter dari peserta didik. Pancasila seolah hanya sebatas dasar Negara yang perlu dihafalkan, dan belum mendarah daging pada jiwa generasi muda khususnya kalangan pelajar. Hal ini tentu menjadi sebuah tantangan besar bagi guru untuk mengambil peranan penting dalam membina dan membelajarkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sejak usia sekolah dasar. Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi problematika tersebut, maka guru

diharapkan mampu melaksanakan pembelajaran yang lebih inovatif, menarik, mendorong motivasi dan sesuai dengan kondisi karakteristik peserta didik khususnya dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, agar dapat lebih mengoptimalkan pencapaian tujuan pembelajaran.

Berkaitan dengan pembelajaran inovatif, di abad ke-21 ini, pesatnya perkembangan teknologi dapat sangat menunjang proses pembelajaran yang lebih inovatif. Urgensi literasi teknologi dalam pembelajaran pun menjadi tuntutan. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat suatu *framework* ataupun kerangka kerja yang disebut dengan *Technological Pedagogical Content Knowledge* (TPACK). TPACK merupakan salah satu jenis pengetahuan yang harus dikuasai guru untuk dapat mengintegrasikan teknologi dengan baik dalam pembelajaran (Cox & Graham, 2009; Koehler, M & Mishra, P, 2009). Guru profesional harus memiliki kompetensi TPACK yang memadai, karena TPACK berada dalam ranah kompetensi terutama kompetensi pedagogik dan kompetensi professional (Doering, dkk., 2009). TPACK mengacu pada integrasi 3 pengetahuan dasar, yakni *Content Knowledge* (CK)/penguasaan konten materi, *Pedagogical Knowledge* (PK)/pengetahuan pedagogi dan *Technological Knowledge* (TK)/pengetahuan teknologi (Rahmadi, 2019; Mairisiska, Sutisna, 2014). Integrasi teknologi dalam pembelajaran adalah suatu fenomena yang tidak dapat dihindari karena teknologi semakin hari semakin melekat. Siswa maupun guru pada abad ke-21 ini harus memiliki literasi teknologi yang memadai (Drew, 2012; Kereluik, Mishra, Fahnoe, & Terry, 2013; Trust, 2018). Oleh karena itu berdasarkan paparan mengenai TPACK tersebut, maka dalam pembelajaran PPKn yang lebih inovatif atau menarik, guru juga dapat mengintegrasikan materi pancasila, kemampuan pedagogi dan teknologi.

Keterlibatan bantuan teknologi dalam pembelajaran sudah mulai bermunculan dewasa ini seiring dinamika perkembangan teknologi itu sendiri. Sejalan dengan Arief (2013) bahwa di dalam dunia pendidikan khususnya di sekolah-sekolah, perkembangan teknologi ini ditandai dengan semakin tersedianya fasilitas pembelajaran yang berbasis teknologi, seperti komputer atau laptop, bahkan sampai pada gawai *mobile*. Fasilitas tersebut sudah selayaknya dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran baik dari perencanaan,

pelaksanaan, serta evaluasi. Dalam tahap perencanaan, guru sebagai pengembang kurikulum disarankan untuk merancang bahan ajar sendiri, agar pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai analisis dan karakteristik peserta didik. Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Handayani (2012) bahwa terdapat sejumlah alasan, mengapa guru perlu mengembangkan bahan ajar, antara lain; ketersediaan bahan sesuai tuntutan kurikulum, karakteristik sasaran, dan tuntutan pemecahan masalah belajar. Komalasari (2010) mengatakan bahwa bahan ajar yang baik itu memerhatikan penyajian yang menarik, menantang, dan bervariasi sehingga siswa benar-benar termotivasi untuk mempelajarinya.

Berdasarkan hasil penelusuran dan analisis melalui wawancara terhadap guru kelas V Sekolah Dasar didapat temuan informasi bahwa dalam ketersediaan bahan ajar pembelajaran PPKn yang sesuai dengan tuntutan kurikulum masih kurang dan cenderung mengandalkan bahan ajar dari buku tematik yang ada. Bentuk media pembelajarannya pun masih menggunakan bentuk visual atau gambar pada buku teks. Sebagian materi pada mata pelajaran PPKn hampir dominan menggunakan metode proses hafalan, diskusi dan penugasan, termasuk pada materi Penerapan Pancasila. Menyikapi kurangnya ketersediaan bahan ajar pada pembelajaran PPKn tersebut sekaligus sebagai upaya membuat pembelajaran PPKn yang lebih menarik, maka penelitian ini berfokus pada pengembangan bahan ajar digital pada materi penerapan pancasila. Materi Pancasila ini merupakan materi dengan esensi yang luhur dimana tujuan pendidikan PPKn mengarah pada pembentukan warga negara dengan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Selain memuat materi tentang penerapan pancasila, konten bahan ajar yang peneliti kembangkan juga memuat Profil Pelajar Pancasila. Hal ini karena dalam kurikulum paradigma baru upaya pendidikan karakter diimplementasikan melalui Profil Pelajar Pancasila. Profil ini dirancang berdasarkan kajian yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kompetensi Abad 21. gagasan dari Profil Pelajar Pancasila ini sudah disesuaikan dengan citra individu Indonesia sebagai warga negara maupun warga global. Sebagaimana pendapat Irawati, dkk (2022) bahwa menjadi Pelajar Pancasila artinya menjadi pelajar yang memiliki jati

diri yang kuat sebagai bangsa Indonesia, namun juga cakap dan percaya diri untuk berkontribusi dalam mengatasi masalah-masalah global.

Alternatif sajian bahan ajar digital yang peneliti kembangkan ialah bahan ajar digital dalam bentuk *flipbook*. *Flipbook* menurut Gusman, Apriliya & Mulyadiprana (2021) adalah hasil dari perkembangan teknologi berupa *software* lembaran buku digital dengan banyak animasi, gambar, video, dan audio yang dirancang menarik dan interaktif untuk siswa, agar tercapai tujuan pembelajaran yang menyenangkan dengan hasil belajar yang memuaskan. Studi menunjukkan bahwa buku digital dengan format *flipbook* sangat bermanfaat memotivasi secara emosional, dan lebih memudahkan siswa memahami pembelajaran. (Aperta & Amini R, 2021). Menurut Amanullah (2020) media *flipbook* digital adalah alternatif meningkatkan pembelajaran siswa di era revolusi 4.0 dengan pembelajaran yang bervariasi dari segi tampilan visual maupun audiovisual untuk lebih menarik siswa belajar. Dari beberapa penelitian terdahulu menurut Fonda & Sumargiyani (2018) membuktikan media *flipbook* meningkatkan keterampilan berfikir, kreatifitas dan keaktifan siswa sehingga sangat layak untuk dikembangkan.

Maka berdasarkan permasalahan degradasi moral, serta kurangnya ketersediaan bahan ajar PPKn untuk siswa sekolah dasar kelas V, maka peneliti melakukan penelitian pengembangan bahan ajar digital *flipbook* pada materi pancasila. Materi pancasila dipilih karena urgensi nilai-nilai karakter di dalamnya. Dengan demikian, judul dari penelitian ini ialah **“Pengembangan Bahan Ajar Multimedia Interaktif *Flipbook* Materi Penerapan Pancasila Pada Pembelajaran PPKn di Kelas V Sekolah Dasar”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Rancangan Bahan Ajar Multimedia Interaktif *Flipbook* Materi Penerapan Pancasila Pada Pembelajaran PPKn di kelas V Sekolah Dasar?
2. Bagaimana Hasil Uji Kelayakan Bahan Ajar Multimedia Interaktif *Flipbook* Materi Penerapan Pancasila Pada Pembelajaran PPKn di kelas V Sekolah Dasar?

3. Bagaimana respon guru dan siswa terhadap Bahan Ajar Multimedia Interaktif *Flipbook* Materi Penerapan Pancasila Pada Pembelajaran PPKn di kelas V Sekolah Dasar?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk Merancang dan menciptakan Bahan Ajar Multimedia Interaktif *Flipbook* Materi Penerapan Pancasila. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui rancangan pengembangan Bahan Ajar Multimedia Interaktif *Flipbook* Materi Penerapan Pancasila di Sekolah Dasar.
2. Untuk mengetahui kelayakan hasil uji Bahan Ajar Multimedia Interaktif *Flipbook* Materi Penerapan Pancasila pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar.
3. Untuk Mengetahui respon guru dan siswa terhadap Bahan Ajar Multimedia Interaktif *Flipbook* Materi Penerapan Pancasila pada pembelajaran PPKn di Kelas V Sekolah Dasar?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini tentunya mendatangkan manfaat secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Bagi Siswa, memperoleh pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuannya dalam belajar materi penerapan Pancasila.
2. Bagi Guru, memperoleh pengetahuan tentang Bahan Ajar yang inovatif dan kreatif yang dapat digunakan untuk mengajar di kelas.
3. Bagi peneliti, melatih keterampilan mengajar dan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan Bahan Ajar.
4. Bagi Sekolah, menambah variasi Bahan Ajar khususnya dalam mata pelajaran PPKn dalam konsep penerapan Pancasila.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi terdiri atas 5 (lima) BAB dimana setiap bagian memiliki cakupannya masing-masing yang akan menggambarkan penelitian dari awal sampai akhir. Bagian yang dimaksud yaitu:

BAB I yang memuat tentang pendahuluan mengenai Latar Belakang yang membuat peneliti mengambil penelitian ini, memuat juga beberapa sumber yang mendukung terhadap penelitian ,terdapat juga rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta spesifikasi produk yang akan menerangkan kegunaan penelitian.

BAB II memuat mengenai teori-teori yang digunakan untuk memperkuat penelitian yang akan dilakukan.

BAB III menggambarkan metode untuk melakukan penelitian maupun pengambilan data sehingga dalam bagian ini akan menggambarkan secara utuh bagaimana penelitian ini ketika diaplikasikan di lapangan nanti.

BAB IV membahas bagaimana keberlangsungan penelitian sehingga terdapatnya berbagai data yang dihimpun.

BAB V menerangkan penafisiran dari temuan dan pembahasan yang dilakukan dalam bagian sebelumnya dan disajikan dalam bentuk simpulan, implikasi dan rekomendasi.